

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT,  
TRANSPARANSI, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Akuntansi (S1)**

**Pada Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Disusun oleh:

Maria Susanti Liu

150422375

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**Skripsi**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT,  
TRANSPARANSI, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL**



**Disusun oleh:**

**Maria Susanti Liu**

**NPM: 150422375**

Telah dibaca dan disetujui oleh:

**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Heni Kurniawan", is positioned below the "Pembimbing" label.

**Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si.**

**16 September 2020**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

**SURAT KETERANGAN**

**No. 904/J/I**

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Desember 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- |                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 1. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA.      | (Ketua Penguji) |
| 2. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si.        | (Anggota)       |
| 3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. | (Anggota)       |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Maria Susanti Liu  
NPM : 150422375

Dinyatakan

**Lulus Dengan Revisi**

Pada saat ini skripsi Maria Susanti Liu telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,



**Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.**  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Nomor : 1362/R/I

10 Juli 2020

Hal : Pencarian data dan penyebaran kuesioner  
untuk penulisan skripsi.

Kepada

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  
Kabupaten Gunungkidul  
Jl. Satria No.3 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi berjudul "**Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul**" yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas :

Nama : Maria Susanti Liu  
No\_Mhs/Prodi : 22375/Akuntansi  
No\_HP : 082340480259  
Alamat : Tambakbayan 7, No.14c, Caturtunggal, Depok, Sleman

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk menyebarkan kuesioner di lingkungan instansi Bapak/Ibu dan mendapatkan data yang diperlukan.

Skripsi yang ditulis oleh yang bersangkutan ini merupakan suatu karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
  
Drs. Agus Budi R, M.Si., Akt., CA.

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT,  
TRANSPARANSI, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 Januari 2021

Yang Menyatakan

Maria Susanti Liu

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahamat dan perlindungan-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAEKAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Ch. Heni Kurniawan, SE., M. Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi, kedua orang tua beserta kakak yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi, seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner, teman-teman Macibur yang selalu memberikan dukungan, dan anggota grup Remaja Beriman yang selalu mendengarkan keluhan kesah selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.



## MOTTO

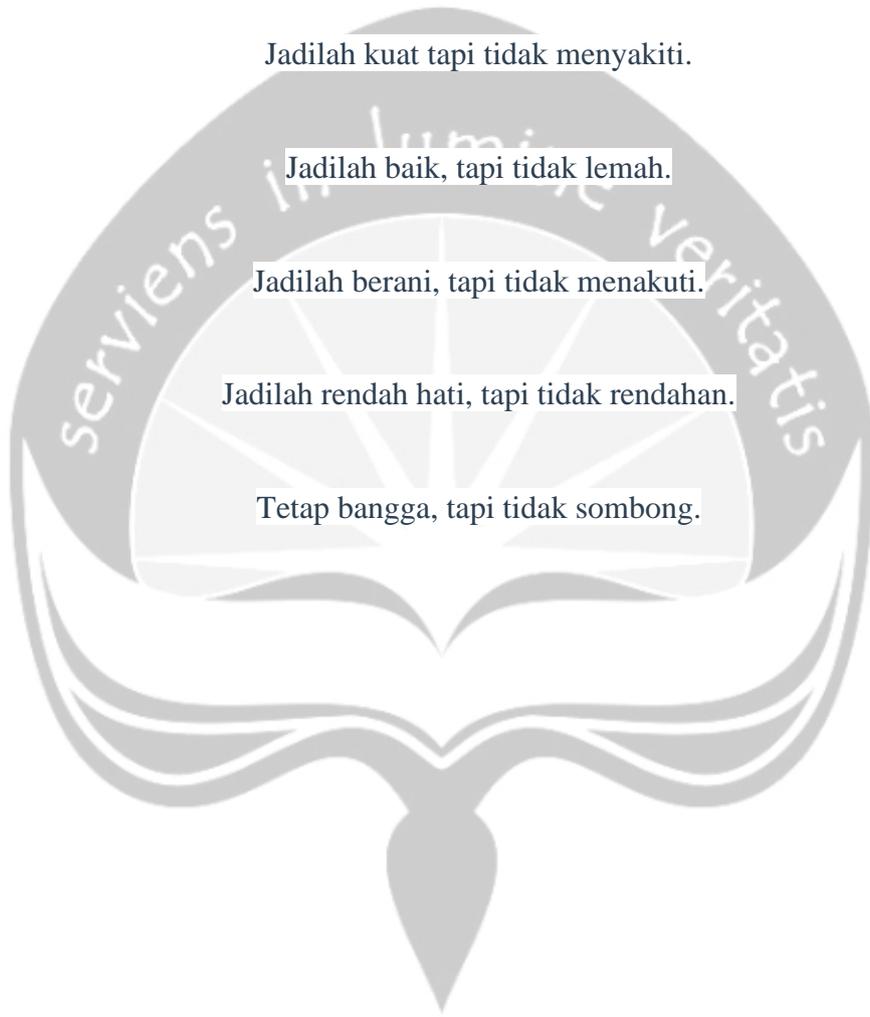
Jadilah kuat tapi tidak menyakiti.

Jadilah baik, tapi tidak lemah.

Jadilah berani, tapi tidak menakuti.

Jadilah rendah hati, tapi tidak rendah.

Tetap bangga, tapi tidak sombong.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN IJIN PENELITIAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
INTISARI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	7

1.4. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....</b>	<b>9</b>
2.1. Pemerintah Daerah.....	9
2.2. Keuangan Daerah .....	12
2.3. Laporan Keuangan .....	14
2.3.1. Peran Laporan Keuangan .....	14
2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan .....	16
2.3.3. Komponen Laporan Keuangan .....	17
2.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	17
2.4.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan .....	17
2.4.2. Indikator dan Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan .....	18
2.5. Akuntabilitas .....	20
2.5.1. Pengertian Akuntabilitas .....	20
2.5.2. Jenis Akuntabilitas .....	21
2.5.3. Dimensi Akuntabilitas .....	22
2.5.4. Pengukuran Akuntabilitas .....	23
2.6. Transparansi .....	24
2.6.1. Pengertian Transparansi .....	24
2.6.2. Dimensi Transparansi .....	26
2.6.3. Pengukuran Transparansi .....	27
2.7. Partisipasi Masyarakat .....	28

2.7.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat .....	28
2.7.2. Tipe Partisipasi .....	29
2.7.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi .....	31
2.7.4. Dimensi Partisipasi Masyarakat.....	32
2.7.5. Indikator Pengukuran Partisipasi Masyarakat .....	35
2.8. Sistem Pengendalian <i>Internal</i> (SPI) .....	35
2.8.1. Pengertian Pengendalian Internal .....	35
2.8.2. Prinsip Pengendalian Internal .....	37
2.8.3. Komponen Pengendalian Internal .....	37
2.9. Kerangka Konseptual .....	39
2.9.1. Teori Keagenan .....	39
2.9.2. Hubungan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	40
2.9.3. Hubungan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	41
2.9.4. Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	41
2.9.5. Hubungan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	42
2.10. Hasil Penelitian Terdahulu .....	43
2.11. Pengembangan Hipotesis .....	46
2.11.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	46
2.11.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	47
2.11.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	48

2.11.4. Pengaruh SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	48
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	50
3.2. Objek dan Subyek Penelitian .....	50
3.3. Populasi Penelitian .....	51
3.4. Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel .....	51
3.5. Variabel Penelitian .....	52
3.5.1. Variabel Bebas (independen) .....	52
3.5.2. Variabel Terikat (dependen) .....	53
3.6. Operasionalisasi Variabel .....	53
3.7. Model Penelitian .....	57
3.8. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.9. Rencana Analisis Data .....	58
3.9.1. Uji Pendahuluan .....	58
3.9.1.1. Uji Alat .....	58
3.9.1.2. Analisis Deskriptif .....	59
3.9.1.3. Uji Asumsi Klasik .....	59
3.9.2. Uji Hipotesis .....	62
3.9.2.1. Notasi Hipotesis Statistika .....	62
3.9.2.2. Tingkat Kesalahan .....	63

3.9.2.3. Model Pengujian statistik .....	64
3.10. Rencana Pembahasan .....	67
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
4.1. Uji Pendahuluan .....	71
4.1.1. Uji Alat .....	71
4.1.2. Uji Deskriptif .....	71
4.1.3. Hasil Uji Normalitas .....	99
4.1.4. Uji Aumsi Klasik .....	100
4.2. Uji Hipotesis .....	102
4.2.1. Pengujian Statistik .....	102
4.2.1.1. Pengujian Nilai t .....	103
4.2.1.2. Uji Nilai F .....	105
4.2.1.3. Koefisien Determinasi .....	106
4.3. Pembahasan .....	107
4.3.1. Pengaruh akuntabilitas terhadap Kualitas LKPD .....	107
4.3.2. Pengaruh transparansi terhadap Kualitas LKPD .....	107
4.3.3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap Kualitas LKPD .....	108
4.3.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas LKPD .....	109
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>110</b>
5.1. Kesimpulan .....	110
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	112

5.3. Saran .....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114
Lampiran I Daftar Pertanyaan Kuesioner .....	119
Lampiran II Hasil Olah Data .....	131



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	45
Tabel 3.1 Operasional Variabel .....	53
Tabel 4.1 Daftar Penyebaran Kuesioner .....	71
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas .....	72
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabel .....	75
Tabel 4.4 Hasil Uji Deskriptif Karakteristik Responden .....	76
Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif .....	78
Tabel 4.6 Analisis Data Deskriptif .....	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	99
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas .....	100
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	101
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Statistik .....	102
Tabel 4.11 Hasil Uji F .....	105
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Penelitian .....	57
Gambar 3.2. Tingkat Kesalahan .....	64



**PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT,  
TRANSPARANSI, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Disusun Oleh :**

**Maria Susanti Liu**

**Pembimbing:**

**Heni Kurniawan Ch., SE., M.Si**

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atma Jaya**

**Yogyakarta**

**Jalan Babarsari 43-44 Yogyakarta**

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat OPD Kabupaten Gunungkidul.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survey dengan melakukan penyebaran kuesioner. Metode analisis yang dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal berpengaruh signifikan positif kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul.

***Kata Kunci:*** Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Lahirnya otonomi menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi (Faisol, 2016). Sistem desentralisasi dan otonomi daerah ini menuntut pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2002), beberapa misi yang terkandung dalam sistem otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dengan bergulirnya UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten atau kota. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan Negara. Pada era otonomi, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk mengelola sumber-sumber keuangan demi kemakmuran rakyat di daerahnya (Halim, 2002). Pelimpahan tanggung jawab

tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat daerah. Hal ini berakibat pada fungsi dan peran yang harus dimainkan oleh para pejabat di daerah.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa hubungan rakyat sebagai *principal* dan kepala daerah sebagai *agent*, serta kepala daerah dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang rakyat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga menerima pelimpahan wewenang atas pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku *agent* terhadap wewenang yang diberikan rakyat, wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah kepada rakyat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (Agustina dan Bagianto, 2019). Dewan perwakilan rakyat daerah yang merupakan representasi keterwakilan rakyat selaku *principal* adalah pengembang fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada dewan perwakilan rakyat daerah tentang keberhasilan berbagai program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi anggaran pendapatan belanja serta opini laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh pemerintah daerah (Budiawan dan Budi, 2014).

Pada semester I tahun 2019, hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018 menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah LKKL yang mendapat opini WTP mengalami peningkatan dari 65% (56 LKKL) pada 2015 menjadi 94% (82 LKKL) pada 2018. Artinya, pemerintah mendekati target opini WTP pada Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sebesar 95% pada 2019. Sedangkan 542 LKPD Tahun 2018, BPK memberikan 443 opini WTP (82%), 86 opini WDP (16%), dan 13 opini TMP (2%). Dari LKPD yang belum memperoleh opini WTP, pada umumnya disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian akun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab lemahnya sistem akuntansi pemerintah daerah. Saat ini akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan sering menjadi problem bagi daerah.

Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/YI99 dalam pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (2003), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD serta adanya keterbukaan kepada masyarakat luas. Hal ini diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang transparansi memberikan informasi keuangan kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Selain akuntabilitas dan transparansi, partisipasi masyarakat juga mempengaruhi kualitas dari penyusunan laporan keuangan. Hal ini diatur dalam PP nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengevaluasian serta penyelenggaraan pelayanan publik. Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam proses penggunaannya. Peraturan tentang sistem pengendalian internal bagi pemerintahan pusat atau daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Penelitian mengenai analisa pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan sudah

dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina dan Bagianto (2019) diperoleh hasil pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada bank di kota Bandung. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Faisol (2016) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Lamongan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mursidah dan Khairina (2018) diperoleh hasil transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan asuransi. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Budiawan dan Budi (2014) menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2017) diperoleh hasil akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

Dari hasil uji beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten mendorong peneliti untuk menguji kembali penelitian tersebut dengan menggunakan objek yang berbeda. Peneliti mengambil objek OPD Kabupaten Gunungkidul sebagai objek penelitian karena pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meraih opini WTP dan meraih nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah (SAKIP) nilai 70,63 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibanding dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan, budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hasil

penilaian evaluasi ini naik dibanding capaian tahun 2017. Wakil Bupati Gunung Kidul menghimbau untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta menargetkan pada tahun 2019 akan mendapatkan predikat A (HarianJogja.com). Akan tetapi, adanya kasus korupsi yang melibatkan sebanyak 19 terpidana korupsi dana tunjangan dewan APBD 2003-2004 sebesar Rp 3,05 miliar hingga saat ini masih belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul. Mantan ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul mempermasalahkan kasus korupsi tunjangan dewan tahun anggaran 2003-2004 yang pernah menjeratnya sebagai terpidana sarat kepentingan politik. Hal ini dilihat dari banyaknya terdakwa yang masih bebas tanpa penegakkan hukum yang tegas. Sejak kasus korupsi ini bergulir pada 2011, sebanyak 33 dari 45 anggota dewan ditetapkan sebagai tersangka namun hingga sekarang baru sebanyak 13 orang yang dijatuhi hukuman (TribunJogja.com).

Dengan adanya kasus-kasus tersebut, maka akan mengakibatkan kinerja pemerintahan yang buruk dan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sehingga mempersulit perolehan nilai yang ditargetkan. Berdasarkan fenomena diatas, maka dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul”** Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul?
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji kembali penelitian terdahulu serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi :

1. Kontribusi Teoritis

Di harapkan melalui penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, penelitian ini di

harapkan dapat menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

## 2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan menjadi bahan masukan dalam proses penyempurnaan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

1. Hipotesis Pertama ( $H_1$ ) diterima dan disimpulkan Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai signifikansi Akuntabilitas ( $X_1$ ) menunjukkan nilai sebesar 0,011 dan nilai koefisien menunjukkan arah positif yaitu 0,155. Dengan adanya akuntabilitas, maka pemerintah daerah diberikan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
2. Hipotesis Kedua ( $H_2$ ) diterima dan disimpulkan Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai signifikansi transparansi ( $X_2$ ) menunjukkan nilai sebesar 0,010 dan nilai koefisien menunjukkan arah positif yaitu 0,146. Dengan adanya transparansi, maka pemerintah memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara bebas dan mudah tentang proses pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian transparansi dapat

dikatakan sebagai pendukung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

3. Hipotesis Ketiga ( $H_3$ ) diterima dan disimpulkan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai signifikansi partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) menunjukkan nilai sebesar 0,045 dan nilai koefisien menunjukkan arah positif yaitu 0,149. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Komunikasi yang terbangun akan mendorong pemerintah membuat keputusan anggaran dan laporan keuangan sesuai dengan prioritas dan nilai aktual masyarakat.
4. Hipotesis Keempat ( $H_4$ ) diterima dan disimpulkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai signifikansi Sistem Pengendalian Internal ( $X_4$ ) menunjukkan nilai sebesar 0,026 dan nilai koefisien menunjukkan arah positif yaitu 0,178. Oleh karena itu hipotesis yang sudah disusun dapat diterima. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian internal yang dimiliki pemerintah daerah.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini telah sesuai dengan tujuan yang dibuat oleh peneliti. Selain menguji hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat, penelitian ini juga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil opini pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Faktor-faktor tersebut adalah Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah mengenai lamanya waktu pengumpulan data. Pengumpulan data membutuhkan waktu yang lama dikarenakan jarak antar lokasi satu dan lainnya cukup jauh. Selain itu, terdapat pula batasan waktu jam kerja pada tiap OPD serta kesibukan dari pejabat OPD di Kabupaten Gunungkidul yang membuat pengumpulan kuesioner membutuhkan waktu lebih lama.

## **5.3. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya pengumpulan data bisa dilakukan secara online sehingga dapat mempersingkat waktu pengumpulan data.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk dapat mempertahankan sistem penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi

yang berlaku sehingga Kabupaten Gunungkidul dapat mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agustina, L.A., dan Bagianto, A. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal dan Corporate governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Kasus Pasda Perbankan di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* Vol 5 No. 2
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. Jakarta
- Boyton, W.C., and Johnson, R.N. (2006). *Modern Auditing*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Budiawan, D. A., dan Budi, S. P. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (1), 276-288
- Effendi, M. A. (2009). *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faisol, A. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

- Kabupaten Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. Volume 1 No.3, ISSN:2502-3764.*
- Giri, E. F. (1995). *Akuntansi Keuangan 1* (Edisi 1). Yogyakarta, Indonesia: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, M.M. dan Halim, A. (2002). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 4). UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama.* Jakarta: Salemba empat.
- dan Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi.* Jakarta: Salemba Empat
- Hamsinar. (2017). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang).* Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Harahap, S. S. (2006). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono, J. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman.* Yogyakarta: BPF.

————— (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFPE.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta

Indriani, M., Nadirsyah., Fahlevy, H., dan Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.7 No.1*

Isbandi, A. R. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Jensen, M. C., and Meckling, W. H. (1976). *The Theory of the firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structurure*. *Journal of Financial and Economic*, 3:305-360

Kieso, Donalds E.; J.J. Weygandt and T.D. Warfield. (2002). *Intermediate Accounting : Akuntansi Intermediate*. Diterjemahkan: Gina Gania dan Uchsan Setiyo Budi. Edisi 10. Jakarta: Erlangga.

Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.

LAN dan BPKP. (2010). *Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1*. Jakarta

Lalolo, K.L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1*.
- Munawir, S . (2010). *Analisis laporan Keuangan* (Edisi 4). Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta: Liberty.
- Mursidah. dan Khairina. (2018). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Asuransi Ajb Bumiputera Kc Lhokseumawe Dan Pt Taspen Kc Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume 6, Nomor 1*
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta. Yogyakarta : Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Mursyidi. (2010). *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Subramanyam, K. R. and J.J. Wild. (2010). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 10). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukhemi. (2011). Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 8, Oktober:84-95*.

Sumarto. (2009). Meningkatkan Komitmen dan Kepuasan untuk Menyurutkan Niat Keluar . *Dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 11, No.2. ISSN 1411-1438*. UPN Jawa Timur

Widodo, J. (2001). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.

<https://yogyakarta.bpk.go.id/pemerintah-daerah-diy-meraih-opini-wtp/>

<https://yogyakarta.bpk.go.id/opini-wtp-tak-berarti-tanpa-kekurangan-dan-kelemahan/>

<https://www.bpk.go.id/news/penyerahan-ihps-i-tahun-2019-dari-bpk-kepada-dpr>

<http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/kabupaten-gunungkidul-raih-nilai-bb-sakip/#more-2403>

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/02/21/513/973419/penilaian-sakip-2019-pemkab-gunungkidul-targetkan-nilai-a->

<https://jogja.tribunnews.com/2018/03/01/kasus-korupsi-tunjangan-dprd-gunungkidul-dinilai-janggal-dan-sarat-kepentingan-politik>

**LAMPIRAN I**  
**DAFTAR PERTANYAAN**  
**KUESIONER**



## LAMPIRAN KUESIONER

### A. IDENTIFIKASI RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Umur :

Nama OPD :

Jabatan :

Lama Bekerja :

(Berikan tanda ceklist (√) pada kotak yang tersedia)

Pend. Terakhir :  SMA  D3  S1

S2  S3

Pengalaman Kerja :  >1 Tahun  1-3 Tahun

>3 Tahun  >5 Tahun

### B. CARA PENGISIAN

Di bawah ini adalah pernyataan - pernyataan yang ditujukan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Bapak/ Ibu/ Saudara/i dimohon kesediaannya untuk memberikan jawaban atas pernyataan tersebut dengan cara memberi tanda ceklist(√) diantara pilihan jawaban yang ada, dengan ketentuan sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

### 1. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Berilah tanda (√) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian Anda, dimana:

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
<b>Relevan</b>					
1	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap.				
2	Laporan keuangan yang saya susun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan				
3	Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna dimasa lalu ( <i>feedback value</i> )				
4	Informasi dalam Laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang ( <i>predictive value</i> )				
5	Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.				
<b>Keterandalan/Andal</b>					
6	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.				
7	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat bebas dari				

	pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.				
8	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan teruji kebenarannya				
9	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang saya buat telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah.				
10	Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan/diatur dalam peraturan perundang-undangan harus menjadi acuan dalam praktik penyusunan laporan keuangan				
11	Media masa dan masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan kepentingan publik sekaligus menjadi media <i>public control</i> dalam penyusunan LKPD				
<b>Dapat Dibandingkan</b>					
12	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya				
13	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan				
14	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.				

15	Saya selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.				
<b>Dapat Dipahami</b>					
16	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna				
17	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna				
18	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna				
19	Laporan Keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti				
20	Laporan keuangan yang disajikan/disusun sesuai dengan pedoman penyusunan LKPD				

## 2. Variabel Akuntabilitas (X<sub>1</sub>)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Rencana strategi daerah dan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD merupakan dasar dalam penyusunan APBD				
2	Pengelolaan APBD disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.				
3	APBD merupakan dokumen publik sehingga masyarakat perlu mengetahuinya				
4	Proses dan pertanggung jawaban APBD diawasi secara terus menerus				

<b>5</b>	Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan kepada masyarakat luas (horizontal)				
<b>6</b>	Informasi masa lalu (sebelumnya) perlu disajikan dalam nota perhitungan APBD				
<b>7</b>	Jaminan pengelolaan APBD merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pengelolaan APBD				
<b>8</b>	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi				
<b>9</b>	Pengawasan APBD perlu dilakukan secara berkelanjutan				
<b>10</b>	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan				
<b>11</b>	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan				
<b>12</b>	Saya merasa perlu untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab saya kepada masyarakat				
<b>13</b>	Menurut saya masyarakat mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang telah diamanahkan kepada anggota dewan				

### 3. Variabel Transparansi (X<sub>2</sub>)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Menurut saya, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi				
2	Informasi yang diberikan kepada publik selama ini menurut saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran				
3	Selama ini masyarakat merasa mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran				
4	Masyarakat selalu mendapatkan pengumuman kebijakan publik tentang anggaran				
5	Laporan pertanggungjawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu				
6	Mudah bagi masyarakat untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena adanya birokrasi				
7	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran				
8	Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi APBD				

### 4. Variabel Partisipasi Masyarakat (X<sub>3</sub>)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Adanya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah mempengaruhi praktik penyusunan laporan keuangan				

2	Opini masyarakat menyebabkan tekanan dalam praktik penyusunan laporan keuangan				
3	Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD				
4	Hilangnya akses bagi masyarakat disebabkan karena dewan telah memanipulasi Informasi tentang perubahan kebijakan dan revisi anggaran				
5	Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan prioritas APBD				
6	Menurut saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD				
7	Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran				
8	Dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan rancangan APBD				
9	Pemantauan pelaksanaan APBD merupakan kewenangan masyarakat				
10	Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi				

#### 5. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X<sub>4</sub>)

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
<b>Lingkungan Pengendalian</b>					
1	OPD telah memiliki stándar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing masing posisi dalam instansi				

2	Pimpinan telah memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah				
3	Pimpinan OPD selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku				
4	Pimpinan OPD secara terus menerus melakukan penilaian kualitas pengendalian internal				
5	Pimpinan Instansi/lembaga di tempat saya bekerja telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik				
<b>Penilaian Resiko</b>					
1	Ditempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko				
2	Pimpinan melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi				
3	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi				
4	Risiko pelaksanaan program dan kegiatan diidentifikasi di tiap tingkatan				
5	Risiko yang ditimbulkan atas program dan kegiatan memiliki pengaruh dan menuntut perhatian pimpinan				

6	Pimpinan mengantisipasi timbulnya risiko akibat perubahan ekonomi, peraturan , kegiatan atau kondisi lainnya dapat mempengaruhi pencapaian sasaran				
<b>Kegiatan Pengendalian</b>					
1	Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang				
2	Ditempat saya bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai				
3	Semua transaksi yang dientri dan diproses kedalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi				
4	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik				
5	Pengeluaran uang pada OPD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas yang telah diberi nomor urut tercetak				
6	Pimpinan instansi terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan				
7	Pencatatan dilaksanakan di seluruh siklus transaksi mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi dalam pencatatan ikhtisar				
8	Kegiatan pengendalian secara berkala dievaluasi untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dan berfungsi sebagaimana mestinya				
<b>Informasi dan Komunikasi</b>					

1	Ditempat saya bekerja telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab				
2	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing OPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya				
3	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat				
4	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan				
5	Tugas dibebankan pada pegawai dikomunikasikan dengan jelas dan dimengerti pengendalian internnya				
<b>Pemantauan</b>					
1	Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, OPD telah melakukan perbaikan pengendalian intern				
2	OPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat				
3	Pemantauan oleh OPD mencakup identifikasi kegiatan dan sistem pendukung pencapaian misi				
4	Pimpinann mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan				

5	Pimpinan menetapkan tindakan yang memadai untuk menindak lanjuti rekomendasi temuan dengan tepat				
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



LAMPIRAN II  
HASIL OLAH DATA



## Reliability: Akuntabilitas

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.834	13

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	41.57	11.175	.517	.820
X1.2	41.61	11.125	.537	.819
X1.3	41.56	11.148	.524	.820
X1.4	41.37	11.449	.466	.824
X1.5	41.40	11.441	.457	.825
X1.6	42.09	12.727	.179	.838
X1.7	41.57	11.218	.503	.821
X1.8	41.57	11.076	.548	.818
X1.9	41.50	10.923	.599	.814
X1.10	41.55	11.107	.537	.819
X1.11	41.52	11.294	.478	.823
X1.12	41.65	11.314	.486	.822
X1.13	41.55	11.735	.340	.833

#### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
45.04	13.155	3.627	13

## Reliability: Transparansi

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	8

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	24.21	4.793	.430	.739
X2.2	24.07	4.495	.572	.713
X2.3	24.06	4.674	.478	.731
X2.4	24.10	4.747	.444	.737
X2.5	24.05	4.762	.434	.739
X2.6	24.11	4.681	.459	.734
X2.7	24.11	4.701	.469	.732
X2.8	24.16	4.923	.368	.750

#### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
27.55	5.963	2.442	8

## Reliability: Partisipasi Masyarakat

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.701	10

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	29.65	4.300	.353	.680
X3.2	30.09	5.064	.301	.697
X3.3	29.76	4.541	.251	.699
X3.4	30.09	5.064	.301	.697
X3.5	29.77	4.281	.375	.676
X3.6	29.70	4.096	.473	.656
X3.7	29.76	4.070	.510	.649
X3.8	29.72	3.990	.538	.643
X3.9	29.70	4.353	.334	.684
X3.10	29.73	4.441	.295	.691

#### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
33.11	5.281	2.298	10

## Reliability: Sistem Pengendalian Internal

### Scale: ALL VARIABLES

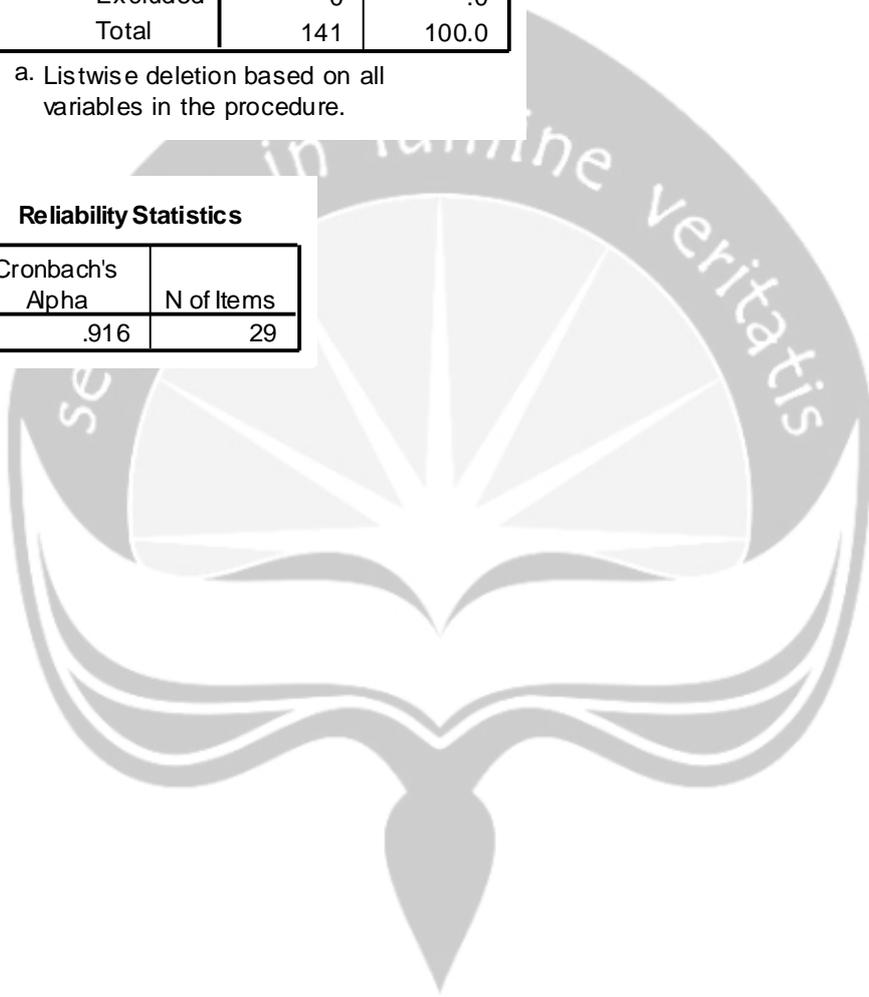
#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.916	29



**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	89.29	35.379	.529	.912
X4.2	89.29	35.836	.431	.914
X4.3	89.24	35.441	.472	.913
X4.4	89.29	35.522	.498	.913
X4.5	89.29	35.436	.516	.912
X4.6	89.27	35.055	.575	.911
X4.7	89.24	35.270	.507	.913
X4.8	89.26	35.524	.472	.913
X4.9	89.28	35.590	.477	.913
X4.10	89.29	35.051	.600	.911
X4.11	89.25	35.217	.523	.912
X4.12	89.26	35.166	.545	.912
X4.13	89.27	35.613	.460	.913
X4.14	89.30	35.496	.511	.913
X4.15	89.30	35.525	.505	.913
X4.16	89.31	35.202	.594	.911
X4.17	89.28	35.348	.528	.912
X4.18	89.32	35.547	.525	.912
X4.19	89.30	35.571	.503	.913
X4.20	89.33	35.293	.593	.911
X4.21	89.35	35.871	.490	.913
X4.22	89.32	35.533	.528	.912
X4.23	89.33	35.452	.567	.912
X4.24	89.31	35.388	.552	.912
X4.25	89.31	35.859	.447	.914
X4.26	89.34	35.640	.534	.912
X4.27	89.41	36.558	.431	.914
X4.28	89.42	37.145	.267	.916
X4.29	89.43	37.447	.196	.916

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
92.50	38.095	6.172	29

## Reliability: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	20

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	60.16	16.766	.393	.890
Y2	60.19	16.442	.519	.885
Y3	60.16	16.537	.461	.887
Y4	60.18	16.351	.540	.885
Y5	60.19	16.327	.555	.884
Y6	60.21	16.293	.585	.883
Y7	60.21	16.283	.598	.883
Y8	60.24	16.427	.594	.883
Y9	60.25	16.745	.492	.886
Y10	60.27	16.784	.516	.886
Y11	60.26	17.006	.410	.888
Y12	60.28	16.819	.533	.885
Y13	60.26	16.377	.640	.882
Y14	60.23	16.295	.628	.882
Y15	60.23	16.666	.498	.886
Y16	60.21	16.640	.479	.887
Y17	60.21	16.526	.517	.885
Y18	60.23	16.881	.425	.888
Y19	60.27	17.027	.425	.888
Y20	60.28	17.248	.365	.890

### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
63.40	18.313	4.279	20

## Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		141
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19544636
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		1.321
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



## Uji Multikolinearitas

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem Pengendalian Internal , Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas, <sup>a</sup> Transparansi	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VF
1	Akuntabilitas	.987	1.014
	Transparansi	.961	1.040
	Partisipasi Masyarakat	.987	1.013
	Sistem Pengendalian Internal	.982	1.019

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Uji Heteroskedastisitas

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem Pengendalian Internal , Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas <sup>a</sup> , Transparansi	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: absolut

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.250 <sup>a</sup>	.062	.035	.12098

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal , Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas , Transparansi

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.132	4	.033	2.261	.066 <sup>a</sup>
	Residual	1.991	136	.015		
	Total	2.123	140			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal , Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: absolut

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.483	.259		-1.867	.064
	Akuntabilitas	.057	.037	.129	1.539	.126
	Transparansi	.064	.034	.160	1.884	.062
	Partisipasi Masyarakat	.056	.045	.104	1.247	.215
	Sistem Pengendalian Internal	.010	.048	.017	.198	.843

a. Dependent Variable: absolut

## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem Pengendalian Internal , Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas, <sup>a</sup> Transparansi	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.407 <sup>a</sup>	.166	.141	.19830

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal , Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas , Transparansi

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.061	4	.265	6.749	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5.348	136	.039		
	Total	6.409	140			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal , Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.067	.424		2.518	.013
	Akuntabilitas	.155	.060	.202	2.567	.011
	Transparansi	.146	.056	.209	2.613	.010
	Partisipasi Masyarakat	.149	.073	.160	2.025	.045
	Sistem Pengendalian Internal	.178	.079	.177	2.244	.026

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

